



2018

2023

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) permendagri 86 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Watampone, 28 Maret 2019
Kepala Dinas PMD Kab. Bone



H. A. ARSYAD, SH, M.Si
Pangkat. Pembina Tk.I
Nip. 19620110 199101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Bone	6
2.2 Sumberdaya Dinas PMD Kabupaten Bone	7
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Bone	8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD Kab. Bone.....	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	14
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih.....	15
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	17
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
BAB IV TUJUAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Bone	25
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Bone	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
5.1 Program dan Kegiatan	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone	7
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone.....	8
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone.....	9
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kab. Bone	11
Tabel 3.1 Telaah Visi dan Misi Terpilih.....	16
Tabel 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan Permasalahan Pelayanan SKPD..	18
Tabel 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	20
Tabel 3.4 Telaah Sasaran Jangka Menengah pada Dokumen KLHS	22
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	28
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Bone.....	34
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra Perangkat Daerah ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai urusan wajib di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Pemerintah Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 maka disusun langkah – langkah operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercantum dalam RENSTRA DINAS PMD Kabupaten Bone. Adapun fungsi dan peran RENSTRA ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan dan tolak ukur Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam penyusunan RENSTRA diawali dengan tahapan Persiapan Penyusunan Renstra yaitu Pembentukan Tim Penyusun, Orientasi Tim Penyusun, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun serta Penyiapan Data dan Informasi, selanjutnya Penyusunan Rancangan Awal Renstra yang didalamnya meliputi Analisis Gambaran Pelayanan, Analisis Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran Strategis kebijakan program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan, kemudian Penyusunan Akhir Renstra, Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Terkait dengan perumusan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam dalam Resntra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD

Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. [Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak](#)
21. [Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender](#)
22. [Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat](#)
23. [Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Bone](#)
24. [Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.](#)
25. [Peraturan Daerah nomor 2 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan](#)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

27. Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di laksanakan secara koordinatif dan terpadu.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai panduan dalam pencapaian target perencanaan dan kinerja pembangunan jangka menengah secara lebih terarah dan berkesinambungan dan juga sebagai penunjang terwujudnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan DINAS PMD tahun 2018 -2023.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE

Bagian ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas PMD Kabupaten Bone, Sumberdaya Dinas PMD, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PMD .

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMD , telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih, telaah renstra Dinas PMD , telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu – isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas PMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat Rumusan Strategi dan Arah kebijakan Dinas PMD untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2018 – 2023.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Rumusan Strategi dan arah kebijakan Dinas PMD untuk 5 tahun kedepan yaitu tahun 2018 – 2023.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat Indikator kinerja Dinas PMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas PMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Bone

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sarana dan Prasarana :

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Station Wagon	1	2	2	2	2
2	Sepeda Motor	13	14	19	19	19
3	Brangkas	1	1	1	1	1
4	Mesin Ketik	2	1	1	1	1
5	Kursi Kayu	12	8	8	8	8
6	Jam Mekanis	1	-	-	-	-
7	Lemari Besi	7	5	5	5	5
8	Filling Besi/Metal	2	2	2	2	2
9	Lemari Kayu	5	-	-	-	-
10	Meja Rapat	10	10	10	10	10
11	Meja Kerja	27	22	22	22	23
12	Kursi Rapat	41	13	13	13	113
13	Sofa	3	4	4	4	4
14	Kursi Tamu	1	-	-	-	-
15	Kursi Kerja	6	7	7	7	8
16	Tabung Pemadam	1	1	1	1	1
17	Sound System	2	1	1	1	1
18	Komputer PC	7	1	5	5	8
19	Laptop	4	4	4	6	11
20	Proyektor	2	1	1	1	1
21	AC	3	-	4	7	7
22	Handpone	-	-	2	7	7
23	Printer	3	-	-	5	8
24	Camera Elektronik	5	-	-	1	1
25	Radio/Tape	-	-	-	1	1
26	Handycam	1	-	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Bone

1. Sasaran Pelayanan

Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, dapat dilihat dari Struktur Organisasi yang terdiri atas 4 Bidang dan 1 Sekretariat yang terdiri atas : Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Bina Pengembangan Kerjasama Evaluasi Desa dan Kelurahan, Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, dan Sekretariat.

Adapun Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa, serta unsur lain yang ada di Desa.

a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana berikut:

Tabel ..
Jumlah Kepala Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bone Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Kades Menurut Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	AJANGALE	10	2	12
2	AMALI	8	6	14
3	AWANGPONE	12	5	17
4	BAREBBO	11	6	17
5	BENGO	9		9
6	BONTOCANI	9	1	10
7	CENRANA	14	1	15
8	CINA	9	2	11
9	DUA BOCCOE	16	5	21
10	KAHU	16	3	19
11	KAJUARA	17		17
12	LAMURU	9	2	11
13	LAPPARIAJA	8	1	9
14	LIBURENG	17	1	18
15	MARE	16	1	17
16	PALAKKA	12	3	15
17	PATIMPENG	8	2	10
18	PONRE	8	1	9
19	SALOMEKKO	6	1	7

No.	Kecamatan	Jumlah Kades Menurut Jenis Kelamin		Total
		L	P	
20	SIBULUE	16	3	19
21	TELLU LIMPOE	10	1	11
22	TELLU SIATTINGE	9	6	15
23	TONRA	11		11
24	ULAWENG	9	5	14
	JUMLAH	270	58	328

Tabel ..
Jumlah Perangkat Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bone Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Kades Menurut Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	AJANGALE	63	35	98
2	AMALI	83	28	111
3	AWANGPONE	106	55	161
4	BAREBBO	85	46	131
5	BENGO	59	14	73
6	BONTOCANI	67	22	89
7	CENRANA	88	45	133
8	CINA	67	35	102
9	DUA BOCCOE	124	46	170
10	KAHU	152	19	171
11	KAJUARA	107	39	146
12	LAMURU	72	20	92
13	LAPPARIAJA	74	6	80
14	LIBURENG	134	32	166
15	MARE	105	32	137
16	PALAKKA	67	64	131
17	PATIMPENG	74	17	91
18	PONRE	67	30	97
19	SALOMEKKO	45	13	58
20	SIBULUE	111	63	174
21	TELLU LIMPOE	61	22	83
22	TELLU SIATTINGE	97	51	148
23	TONRA	71	25	96
24	ULAWENG	85	45	130
	JUMLAH	2064	804	2868

2. Kinerja Pelayanan

Secara lengkap kinerja pelayanan Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	-	-	-	70	73	75	80	85	68,7	75,25	80,3	83	85	98	103	107	103,7	100
2	Jumlah Bumdes yang di fasilitasi (%)	-	-	-	1,21	7,31	13,41	19,51	25,60	0	7,62	15,24	50	55,18	0	104	113,6	256,2	215,5
3	LPM Aktif (%)	-	-	-	49,27	61,95	74,64	87,32	100	42,7	56,6	69,3	85,6	97	86	91,3	92,8	98	97
4	LPM Berprestasi (%)	-	-	-	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	100	100	100	100	100
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (%)	-	-	-	0	0	0	50	55	0	0	0	50	55	0	0	0	100	100
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	PKK Aktif (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Posyandu aktif (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Presentase desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (%)	-	-	-	0	0	0	50	55	0	0	0	50	55	0	0	0	100	100

Melihat tabel 2.3. mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone diatas rata-rata indikator yang ada sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah melebihi target yang telah ditentukan diantaranya yaitu : Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dengan rasio capaian sebesar sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%, Jumlah Bumdes yang difasilitasi dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 215,5%, LPM Berprestasi dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%, PKK Aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%, Posyandu Aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%, Persentase desa yang telah menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%, Capaian ini didukung oleh peran aktif pemerintah daerah serta masyarakat yang ada di desa dalam pencapaian indikator tersebut. Untuk indikator yang belum mencapai target LPM Aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 97%, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diperuntukkan kepada program dan kegiatan tersebut dengan cakupan wilayah dan jumlah desa yang cukup besar dan tidak memungkinkan untuk dapat tersentuh secara keseluruhan.

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke 2014-2018					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2014-2018					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2014-2018					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	2,207,080,400	6,211,368,072	7,708,192,700	9,210,953,500	9,248,227,343	2,203,517,549	6,203,422,072	7,610,356,507	8,970,631,004	9,096,032,460	99.84	99.87	98.73	97.39	98.35	0.33	0.33
BELANJA TIDAK LANGSUNG	565,610,000	1,839,570,072	1,958,192,700	2,110,953,500	2,348,227,343	565,610,000	1,839,570,072	1,920,288,007	1,949,826,004	2,206,333,960	100.00	100.00	98.06	92.37	93.96	0.33	0.31
GAJI DAN TUNJANGAN	565,610,000	1,839,570,072	1,958,192,700	2,110,953,500	2,348,227,343	565,610,000	1,839,570,072	1,920,288,007	1,949,826,004	2,206,333,960	100.00	100.00	98.06	92.37	93.96	0.33	0.31
BELANJA LANGSUNG	1,641,470,400	4,371,798,000	5,750,000,000	7,100,000,000	6,900,000,000	1,637,907,549	4,363,852,000	5,690,068,500	7,020,805,000	6,889,698,500	99.78	99.82	98.96	98.88	99.85	0.33	0.33
Belanja Pegawai	142,500,000	448,280,000	647,380,000	547,995,000	484,600,000	142,500,000	445,800,000	621,280,000	547,995,000	484,600,000	100.00	99.45	95.97	100.00	100.00	0.28	0.28
Belanja Barang dan Jasa	1,498,970,400	3,842,518,000	4,863,620,000	6,411,505,000	5,629,760,400	1,495,407,549	3,837,052,000	4,829,825,000	6,332,310,000	5,619,458,900	99.76	99.86	99.31	98.76	99.82	0.30	0.30
Belanja Modal		81,000,000	239,000,000	140,500,000	785,639,600		81,000,000	238,963,500	140,500,000	785,639,600	#DIV/0!	100.00	99.98	100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Pada tabel 2.4 mengenai anggaran dan realisasi pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada bagian belanja langsung jika dibandingkan alokasi anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang terbesar ada pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 24.272.576.719,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.862.986.484,- atau sebesar 98.31% dan yang terkecil pada tahun 2017 sebesar Rp. 14.782.913.905,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.692.021.357,- atau 99.39% dan realisasi ini merupakan realisasi terbesar selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Melihat tabel 2.5 T-C.24 diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. SulSel memperoleh anggaran rata-rata dalam kisaran Rp. 21.503.812.604,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar rata-rata 98.71% dan rata-rata pertumbuhan -0.12%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Bone

1. Tantangan

Dalam melakukan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menghadapi beberapa tantangan yang harus bisa di atasi, adapun tantangan itu antara lain:

- a. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan apratur pemerintahan desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Kurangnya pemahaman atas pentingnya kerjasama desa.
- d. Minimnya fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam kerjasama desa.
- e. Lembaga kerjasama desa dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- f. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal sebagai efek dari kuatnya dinamika pembangunan
- g. Peranan organisasi non pemerintah yang melakukan pembinaan selama ini tidak teridentifikasi, cenderung melakukan pembinaan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- h. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum

sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.

- i. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,
- j. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
- k. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- l. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- m. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

2. Peluang

Selain tantangan, terdapat juga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembangunan, peluang itu antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasidan kreatifitasuntuk mengoptimalkan pemanfaatanpotensi masyarakat
- b. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PDT dan Transmigrasi serta Kementerian/Lembaga Non Kementerian lainnya sebagai tindak lanjut dari program NAWA CITA Presiden yang diarahkanpada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pendanaan Dana Desa dari APBN.
- c. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- d. Tersedianya tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa di desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi masalah merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah-masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang. DPMD dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya. Diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan menjalankan tugas dan fungsinya tersebut DPMD menghadapi beberapa pula permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness) apabila tidak ditangani segera secara intensif. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMD , adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
2. Kurangnya kapasitas Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
3. Tidak berimbang antara luasnya daerah binaan dan banyaknya daerah binaan dengan SDM aparatur;
4. Kurangnya koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tingkat daerah dan desa;
5. Rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023, Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 adalah:

“Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa (pembentuk kalimat), dengan arti masing-masing sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah – daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan akses , pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Bone ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone, maka dapat ditelaah dari semua Misi mulai dari 1 (satu) sampai dengan misi ke 4 (empat) dan Misi ke 6 (enam) dari RPJMD Kabupaten Bone.

Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Telaah Visi dan Misi Bupati Terpilih

No	Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Kurangnya Profesionalisme SDM Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Upaya penguatan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.	Tidak berimbang antara luas daerah binaan dan banyaknya daerah binaan dengan jumlah aparatur	Kurangnya jumlah aparatur DPMD dalam pembinaan pengembangan kemandirian ekonomi	Dukungan pengembangan kemandirian melalui peran Pendamping Profesional pada kegiatan pemberdayaan
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Jumlah penduduk lebih besar dibanding jumlah cakupan layanan sosial dasar di tingkat Desa	Banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Adanya program-program kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya pada masyarakat kurang mampu
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah	Banyaknya desa-desa yang masih tertinggal dalam pembangunan	Tingginya ketimpangan pembangunan daerah di wilayah perkotaan dan perdesaan	Pengembangan produk unggulan desa, mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi,

No	Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	berbasis desa dan kawasan perdesaan.			keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya keberadaan BUMDES di Desa - Perubahan regulasi pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya peranan masyarakat dalam pengembangan inovasi desa - Kapasitas SDM Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kreativitas dan pengembangan inovasi Desa - Terbentuknya Wadah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (WARKOPP DESA)
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Menurunnya nilai-nilai social masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya local	Pudarnya semangat gotong royong, tolong menolong, tudang sipulung dan semakin tingginya individualisme	Pelestarian nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan Rensta Provinsi

Untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara perangkat Daerah kabupaten dengan Kementerian/Lembaga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi, Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;

- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah :

1. meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen;
2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen; dan
3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 71,5.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
2. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
3. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan penguasaan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
5. Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

Tabel 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan permasalahan pelayanan SKPD Kabupaten

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L/ SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan	Keterbatasan kuantitas SDM Aparatur terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi	Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa belum merata	Regulasi dan kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Desa
2.	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan	Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di	Belum maksimalnya sistem pemberdayaan masyarakat desa dan	Regulasi permendagri

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L/ SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	masyarakat dalam pembangunan desa	perdesaan	sistem pengembangan desa	Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
3	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Usaha ekonomi masyarakat yang relatif beragam	Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan	Masyarakat memiliki kemauan untuk mandiri
4	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan penguasaan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin	Belum terdapat regulasi di daerah yang mendukung pengelolaan sumberdaya alam program TTG	Terbatasnya kapasitas pengelola SDA Belum terdapat SOP khusus TTG	Kreatifitas dan inovasi pengelolaan sumberdaya alam Pelaksanaan gelar TTG Nasional yang dilakukan rutin setiap tahun
5	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan	Ketidakseimbangan antar personil dengan luas wilayah	Rendahnya Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia	Pelaksanaan Bimtek Aparatur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten, mengingat bahwa dalam satu ruang yang digunakan terdapat para pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam Tabel 3.4 di bawah ini, didiskripsikan bahwa pola struktur ruang dititikberatkan Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Bone, dan Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan dan Perdesaan, dimana peningkatan infrastruktur dasar permukiman masih menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang wilayah di Kabupaten Bone.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2033, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone antara lain memprioritaskan pada pengembangan kawasan perdesaan, pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya;

Disamping itu pengembangan kawasan perdesaan diatur pada Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone Keputusan Bupati Bone Nomor 528 Tahun 2015 tentang Penetapan 5 Desa Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Mallusetasi Kabupaten Bone, Keputusan Bupati Bone Nomor 533 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone, Tim Koordinasi Pemabangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Mallusetasi dan Tim Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone, Keputusan Bupati Bone Nomor 556 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Agribisnis, Kawasan Ternak Terpadu, Kawasan Perikanan dan Rumput Laut, Kawasan Wisata Pantai dan Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone dan Keputusan Bupati Bone Nomor 557 Tahun 2017 tentang penetapan desa sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone, yang selanjutnya digambarkan pada table berikut :

Tabel 3.3 Telaah Rencana Struktur Ruang dan Struktur Ruang Saat ini

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Pemanfaatan Ruang pada Periode Rencana Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan DPMD
1	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perikanan dan Rumput Laut	diarahkan pada jarak minimal 300 meter dari garis pantai di Kecamatan Kajuara (Desa Pude, Desa Tarasu, Desa Ancu, Desa Angkue, Desa Polewali, Desa Mallahae, Desa Padaelo, Desa Massangkae)
			Pengembangan kawasan peternakan (ternak terpadu)	Kecamatan Lamuru desa Bara`kkae, Desa Poleonro, Desa Massenreng Pulu, Desa Mattampawalie)
			Pengembangan kawasan Agri bisnis	Kecamatan Libureng meliputi Desa Pitumpidange, Desa Suwa, Desa Laburasseng, Desa

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Pemanfaatan Ruang pada Periode Rencana Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan DPMD
				Tappale, Desa Wanuwawaru, Desa Polewali
			Pengembangan Kawasan Pesisir	Kawasan Mallusetasi : Kecamatan Cenrana meliputi Desa Laoni, Desa Latonro, Desa Panyiwi, Kecamatan Tellu Siattinge meliputi Desa Mattoanging, Desa Lamuru
			Pengembangan Kawasan Wisata Pantai	Kecamatan Tonra meliputi Desa Libureng, Desa Samaenre, Desa Padatuo, Desa Rappa, Desa Bulu-Bulu, Desa Ujunge, Desa Bone Pute, Desa Bacu.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

KLHS memuat kajian tentang :

1. Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.
2. Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.
4. Perumusan skenario berupa analisis capaian target TPB pada tahun 2019, 2023, dan 2030 berdasarkan data tren pencapaian 4 tahun sebelumnya dengan menggunakan pendekatan rasio pertumbuhan dengan interval waktu tetap.

Tabel 3.4 Telaah Sasaran Jangka Menengah pada Dokumen KLHS dan permasalahan yang pelayanan SKPD Kabupaten

No.	Sasaran Jangka Menengah pada Dokumen KLHS	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan	Belum optimalnya sinergitas antar SKPD dalam pembinaan perekonomian masyarakat di perdesaan	Keanekaragaman usaha ekonomi masyarakat dan cakupan wilayah yang relatif luas, dan kapasitas SDM Aparatur di DPMD	Adanya BUMDesa, Pasar Desa, dan LKM lainnya di perdesaan dapat menggali potensi ekonomi masyarakat
2.	Optimalisasi pembangunan dan tata kelola/ administrasi/ manajemen Pemerintahan Desa/ Kel	Fasilitasi peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen pemerintahan desa, serta pembangunan desa dalam bentuk monitoring dan evaluasi belum dapat menjangkau setiap desa.	Kuantitas SDM Aparatur SKPD belum memadai untuk menjangkau setiap desa.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam bidang: Perencanaan, Pengelolaan Anggaran, Program dan Kegiatan, serta Pertanggungjawaban

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa masih kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda

organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

2. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

3. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : tolong menolong, gotong royong, tudang sipulung dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

4. Masih Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Belum Optimalnya Lembaga ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan perekonomian desa melalui Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan

perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

6. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan. Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Bone

Secara garis besar guna menyelaraskan dan bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Bone tersebut, maka tujuan rencana strategis DPMD adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggungjawab
2. Mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan masyarakat yang berada diatas garis kemiskinan
3. Meningkatkan sumber daya masyarakat perdesaan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
4. Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dan perkotaan
6. Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat

Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelestarian dan pengembangan adat istiadat, seni dan budaya

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Bone

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, Sumber Daya Manusia aparat pemerintah, lembaga pemberdayaan dan masyarakat desa
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan lembaga masyarakat desa
3. Meningkatnya peran Aktif kader PKK Desa
4. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan kader posyandu yang terintegrasi di desa
5. Meningkatnya desa – desa yang mengelola sumber daya unggulan diwilayahnya masing – masing
6. Meningkatnya dunia usaha dan masyarakat pengusaha
7. Terbentuknya Lembaga Adat desa

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018-2023					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP	C	CC	B	B	BB	BB
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang mendukung kesejahteraan masyarakat Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	85%	90%	93%	95%	100%	100%
			Persentase desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa	60%	68%	70%	84%	92%	100%
			Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	85%	88%	92%	95%	97%	100%
			Persentase LPM Aktif	97%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase LPM Berprestasi	6,7%	7,50%	9,10	10,90%	11,70%	12,50 %
			Persentase Lembaga Adat Aktif						
			Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat desa melalui pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah bumdes aktif	92%	100%	100%	100%
			% desa yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)	92%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi serta kebijakan yang tepat untuk mendukung visi dan misi yang sudah ada. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Berikut merupakan strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone :

1. Mengoptimalkan peran aparatur pemerintah desa, pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
2. Menyusun dokumen pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat desa
3. Mengoptimalkan peran masyarakat khususnya perempuan di pedesaan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
4. Mengoptimalkan pengembangan pelayan posyandu terintegrasi di desa
5. Mengoptimalkan pembangunan di segala sektor
6. Pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pelaku dunia usaha
7. Mengoptimalkan peran lembaga adat yang ada di desa

Selain diperlukan strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran juga diperlukan kebijakan. Kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu ;

1. Penguatan sumber daya aparat pemerintah desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat desa serta pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Menyusun dokumen pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat desa
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebagai wujud peningkatan kesejahteraan keluarga
4. Menyusun regulasi daerah dalam bentuk surat keputusan pokjandal posyandu terintegrasi tingkat kabupaten
5. Menyusun dokumen perencanaan kawasan pedesaan
6. Menciptakan proses pelayanan publik yang efektif dan efisien
7. Mendorong terbentuknya lembaga adat di setiap desa

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menciptakan Penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggungjawab	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, SDM aparat pemerintah, lembaga pemberdayaan dan masyarakat desa	Mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa	Penguatan sumber daya aparat pemerintah desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat desa serta pelaksanaan Pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi kesenjangan anantara masyarakat yang berada di bawa garis kemiskinan dan masyarakat yang berada diatas garis kemiskinan Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Perdesaan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat desa dan lembaga ekonomi masyarakat desa Meningkatnya Peran Aktif Kader PKK Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peran SDA dan SDM Mengoptimalkan Peran Masyarakat khususnya perempuan di pedesaan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 3 : Meningkatkan akses, pemetaan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan kader posyandu yang terintegrasi di desa	Mengoptimalkan pengembangan pelayan posyandu terintegrasi di desa	Menyusun regulasi daerah dalam bentuk surat keputusan pokjnal posyandu terintegrasi tingkat kabupaten
VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatnya desa-desa yang memiliki sumber daya unggulan	Mengoptimalkan pembangunan di segala sector	Menyusun dokumen perencanaan kawasan perdesaan.

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 5 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan arus investasi di Desa.	Meningkatnya Realisasi Investasi di desa	Meningkatkan Investasi dan kerjasama pihak swasta di Desa	Mendorong terbentuknya BUMDEs di semua desa, dan kerjasama pihak swasta di Desa
Mengembangkan inovasi desa dalam pelayanan publik.	Berkembangnya inovasi desa dalam pelayanan publik	Mengoptimalkan Inovasi Desa dalam Pelayanan Publik	Mendorong regulasi dan pelaksanaan SPM di Desa
VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 6 : Meningkatnya budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Untuk menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelestarian dan pengembangan adat istiadat, seni dan budaya.	Terbentuknya Lembaga Adat Desa	Mengoptimalkan peran lembaran adat yang ada di desa	Mendorong terbentuknya Lembaga Adat di setiap desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas dan fungsi maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka berikut Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Rincian kegiatan Sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Desiminasi dan Informasi bagi Masyarakat Desa (tentang Posyandu Terintegrasi dalam upaya Pencegahan Stunting
 - b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa
 - c. Bimtek dan Penguatan Kader Posyandu
 - d. Pelatihan Pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
 - e. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Partisipatif Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Desa Sehat
 - f. Monev Pengelolaan Keuangan Partisipatif Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat
 - g. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa
 - h. Rapat Koordinasi Pendamping Desa
 - i. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam penerapan TTG penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna
 - j. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Penyelenggaraan Bintek Posyantek)
 - k. Pembinaan dan Pelatihan Pengelola Pamsimas
 - l. Pelatihan Biogas dan Potensi SDA
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan rincian kegiatan Sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan
 - b. Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
 - c. Sosialisai Pengembangan Industri Rumah Tangga berbasis Komoditas (Kepiting dan Kelapa)

- d. Pelatihan Pengembangan Produksi Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat (bimbingan Teknis dan Publikasi Hasil Industri Rumah Tangga di Lokasi Pameran TTG Tingkat nasional)
 - e. Pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan Pasar Desa/Tradisional (Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa)
 - f. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa dalam pengelolaan Potensi Kekayaan Desa
 - g. Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga
 - h. Orientasi Lapangan dalam rangka peningkatan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - i. Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes dan LKM Pedesaan
 - j. Rakernis Pengelola BumDes
 - k. Pembinaan Kawasan Perdesaan
 - l. Pelatihan Teknis Administrasi Keuangan bagi Pengurus dan Pengelola BumDes
 - m. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan
 - n. Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Kawasan Perdesaan
 - o. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Perdesaan
 - p. Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan BumDes
 - q. Pembinaan Forum Komunikasi Kerjasama BumDes Kabupaten Bone
 - r. Pembinaan Bumdes berprestasi Kabupaten Bone
 - s. Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal Bumdes
 - t. Pembinaan Aparat Pemdes dalam Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan
 - u. Pembinaan Bumdes Bersama Kawasan Perdesaan
 - v. Kajian Tata Kelola Permodalan BumDes
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan Rincian kegiatan Sebagai berikut :
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pendayagunaan Profil -desa dan kelurahan
 - c. Pembinaan, Monitoring dan evaluasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa
 - d. Pemilihan Kepala Desa
 - e. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
 - f. Pengukuhan Anggota BPD
 4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa
 - c. Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa

- d. Bimbingan Teknis Kepala Desa
 - e. Bimbingan Teknis Perangkat Desa
 - f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - g. Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam bidang politik hukum desa
 - h. Pelatihan Kapasitas BPD
 - i. Pelatihan Administrasi Desa
 - j. Pelatihan Manajemen Kekayaan dan Aset Desa
 - k. Monitoring dan evaluasi kerjasama desa
 - l. Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPJMD Desa
5. Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Revitalisasi Pokjandal Posyandu
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelompok Industri Rumah Tangga PKK
 - c. Kegiatan Sarasehan Penguatan TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan & Kabupaten
 - d. Pelatihan Kader Posyandu di Desa
 - e. Pelatihan MC bagi kader PKK
 - f. Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan untuk turut serta dalam pembangunan desa
 - g. Pelatihan Pengurus Kader Pokja Desa Sehat
 - h. Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam membangun desa
 - i. Studi Banding Kader Posyandu terintegrasi
 - j. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan pada Hari Kesatuan Gerak PKK
6. Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan, keuangan dan Aset desa dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa
 - b. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
 - c. Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tk. Kecamatan
7. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Evaluasi dan Lomba Desa kelurahan
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Rincian kegiatan Sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Rapat-rapat Koordinasi dan Koonsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah
10. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan Rincian kegiatan Sebagai berikut :
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pengadaan Peralatan Kantor
 - d. Pengadaan Mebeluer
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - i. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
11. Program Peningkatan Disiplin aparatur dengan Rincian kegiatan Sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
12. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Rincian kegiatan Sebagai berikut :
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - b. Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur
13. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
14. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
15. Program Penunjang Pemerintahan Umum
- a. Penyusunan Rencana Program Perangkat Daerah
 - b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribuan)			
								TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP				Nilai	C	CC		B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB				
			01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	%	-	100	647,681	100	702,000	100	703,000	100	703,000	100	705,000	100	3,460,681	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone	
			1:01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon (Rekening)	rek	24	48	18,000	48	20,000	48	20,000	48	20,000	48	20,000	48	98,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone	
			1:07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparat yang Mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	orang	45	45	160,128	45	200,000	45	200,000	45	200,000	45	200,000	45	960,128	Sub Bagian Keuangan	Dinas PMD Kabupaten Bone	
			1:15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (media)	Media	7	7	12,000	10	17,000	12	18,000	12	18,000	12	20,000	12	85,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone	
			1:23	Rapat-rapat Koordinasi dan Koonsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yg diikuti (kegiatan)	kegiatan	100	100	300,000	100	300,000	100	300,000	100	300,000	100	300,000	500	1,500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone	
			1:34	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Administrasi Perkantoran (Paket)	paket	5	5	157,553	5	165,000	5	165,000	5	165,000	5	165,000	5	817,553	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribuan)		
								TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)		
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%		100	898,710	100	577,500	100	602,500	100	602,500	100	602,500	100	3,283,710		
			2:07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Unit)	unit	8	8	84,350	8	85,000	8	85,000	8	85,000	8	85,000	40	424,350	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	unit	24	-	-	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	12	400,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	unit	5	5	41,000	10	100,000	5	75,000	5	75,000	5	75,000	25	366,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:10	Pengadaan Mebeluer	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	Paket	1	1	72,000	5	25,000	3	75,000	2	75,000	2	75,000	12	322,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yg Terpelihara (Unit)	unit	1	1	6,020	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	32,020	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal yg Terpelihara	Unit	24	24	138,500	24	140,000	24	140,000	24	140,000	24	140,000	24	698,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yg Terpelihara	Paket	4	4	20,080	10	21,000	10	21,000	10	21,000	10	21,000	10	104,080	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	2	2	-	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	2	400,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			2:45	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yg di Rehabilitasi	Paket	1	1	536,760	1	-	-	-	-	-	-	-	1	536,760	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur	%	-	-	-	100	40,000	100	40,000	100	40,000	100	40,000	100	160,000		
			3:02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Pasang	0	0	-	30	40,000	30	40,000	30	40,000	30	40,000	120	160,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	-	-	-	100	175,000	100	175,000	100	175,000	100	175,000	100	700,000		
			5:03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yg Mengikuti Bimtek (orang)	Orang	0	0	-	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	20	200,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			5:32	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Jumlah Aparat yang mengikuti pengembangan kompetensi (orang)	Orang	0	0	-	5	125,000	5	125,000	5	125,000	5	125,000	20	500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD Kabupaten Bone
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	-	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	120,000		
			6:01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	3	3	-	3	15,000	3	15,000	3	15,000	3	15,000	15	60,000	Sub Bagian Program	Dinas PMD Kabupaten Bone
			6:02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	dokumen	3	3	-	3	15,000	3	15,000	3	15,000	3	15,000	15	60,000	Sub Bagian Keuangan	Dinas PMD Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
			08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum	%		100	94,610	100	145,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	539,610		
			8:01	Penyusunan Rencana Program Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia	Dokumen	7	7	94,610	6	100,000	6	100,000	7	100,000	6	100,000	29	494,610	Sub Bagian Program	Dinas PMD Kabupaten Bone
			8:02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website tersedia	Paket	0	0	-	1	45,000	1	-	1	-	1	-	1	45,000	Sub Bagian Program	Dinas PMD Kabupaten Bone
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang mendukung kesejahteraan masyarakat Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Indeks Keberdayaan masyarakat pedesaan	%	70	73	1,053,000	73	1,700,000	73	1,700,000	75	1,700,000	75	1,700,000	75	7,853,000		
		-	15:03	Penyelenggaraan Desiminasi dan Informasi bagi Masyarakat Desa (tentang Posyandu Terintegrasi dalam upaya Pencegahan Stunting)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti desiminasi dalam upaya Pencegahan Stunting (Orang)	Orang	100	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	15:16	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan dalam Penerapan TTG (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelompok dalam Penerapan TTG (Kegiatan)	kegiatan	1	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	1,000,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	15:30	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina (lembaga)	jumlah lembaga	20	40	53,000	60	100,000	80	100,000	100	100,000	100	100,000	100	453,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
		-	15:40	Bimtek dan Penguatan Kader Posyandu	Jumlah Kader yang mengikuti BIMTEK (orang)	orang	0	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	15:42	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun Perencanaan Desa Tepat Waktu	desa	80	295.2	200,000	305.04	200,000	312	200,000	321	200,000	328	200,000	328	1,000,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kab Bone
			15:43	Rapat Koordinasi Pendamping Desa	Jumlah Pelaksanaan Rakor Pendampingan (Kali)	kali	4	6	200,000	6	200,000	6	200,000	6	200,000	6	200,000	30	1,000,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kab Bone
		-	15	Pelatihan Pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Jumlah Pengurus FKKS yang dilatih	Orang	-	-	-	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	400	800,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	15	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Partisipatif Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Desa Sehat	Jumlah Anggota Pokja yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan Partisipatif (orang)	Orang	-	-	-	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	400	800,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	15	Monev Pengelolaan Keuangan Partisipatif Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat	Jumlah Kegiatan Monitorig dan evaluasi Pengelolaan Keuangan	kegiatan	-	-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	16	Pengembangan Lembaga Ekonomi desa	Persentase lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	%	-	-	1,475,000	90	5,025,000	92	5,100,000	95	5,050,000	97	5,100,000	97	21,750,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
			16:03	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	Jumlah Peserta Terlatih	Orang	-	-	-	30	200,000	30	200,000	30	200,000	30	200,000	120	800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:05	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	UMKM yang difasilitasi	Unit	-	-	-	30	100,000	30	100,000	30	100,000	30	100,000	120	400,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:09	Sosialisasi Pengembangan Industri Rumah Tangga berbasis Komoditas (Kepiting dan Kelapa)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Kali	-	-	-	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	4	600,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:10	Pelatihan Pengembangan Produksi Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat (bimbingan Teknis dan Publikasi Hasil Industri Rumah Tangga di Lokasi Pameran TTG Tingkat nasional)	Pelaksanaan Publikasi dan Bimtek	Kali	-	-	-	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	4	1,000,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:11	Pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan Pasar Desa/Tradisonal (Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa)	Jumlah Peserta Bimtek	Orang	-	-	-	30	200,000	30	200,000	30	200,000	30	200,000	120	800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:13	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa dalam	Jumlah Aparat Desa Terlatih	orang	-	-	-	30	200,000	30	200,000	30	200,000	30	200,000	120	800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha	Dinas PMD Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
				pengelolaan Potensi Kekayaan Desa															Ekonomi Desa		
			16:18	Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga	Jumlah Pelatihan yg dilaksanakan	kali	-	-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:20	Orientasi Lapangan dalam rangka peningkatan kelompok usaha ekonomi keluarga	Jumlah Pelaksanaan Orientasi Lapangan	kali	-	-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:24	Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes dan LKM Pedesaan	Jumlah Pengelola Bumdes yang dilatih	orang	-	-	-	100	400,000	80	300,000	80	300,000	80	300,000	340	1,300,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:31	Rakernis Pengelola BumDes	Jumlah Pelaksanaan Rakernis	kali	-	-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	4	800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:23	Pembinaan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang dibina	Kawasan	8	-	-	10	300,000	10	300,000	12	300,000	12	300,000	44	1,200,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:34	Pelatihan Teknis Administrasi Keuangan bagi Pengurus dan Pengelola BumDes	Jumlah Pengurus dan Pengelola Bumdes yang dilatih	orang	-	610	250,000	610	200,000	610	300,000	610	250,000	610	300,000	3,050	1,300,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	16:36	Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina (desa)	Kec/Desa	8/33	8/33	200,000	8/33	300,000	8/33	300,000	8/33	300,000	8/33	300,000	8/33	1,400,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:37	Pelatihan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Pengelola	Orang	-	-	-	200	300,000	200	300,000	200	300,000	200	300,000	800	1,200,000	Bidang Bina Pembangunan dan	Dinas PMD Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
				Pengelola Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan															Usaha Ekonomi Desa	
		-	16:39	Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan BumDes	Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Bumdes	Dokumen	1	1	200,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	1,400,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	16:41	Pembinaan Asosiasi BumDes Kabupaten Bone	Jumlah Asosiasi Bumdes yang dibangun (kegiatan)	kegiatan	1	1	125,000	1	225,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	1,250,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:42	Pembinaan Bumdes berprestasi Kabupaten Bone	Jumlah Bumdes Berprestasi	Bumdes	-	-	-	10	200,000	10	200,000	10	200,000	10	200,000	40	800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	16:43	Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal Bumdes	Jumlah Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal (kegiatan)	kegiatan	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:44	Pembinaan Aparat Pmdes dalam Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Aparat Pengelola Ekonomi Kerakyatan	Orang	-	-	-	50	100,000	50	100,000	50	100,000	50	100,000	200	400,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	16:46	Pembinaan Bumdes Bersama di Kawasan Perdesaan	Jumlah Bumdes Bersama di Kawasan Perdesaan (kegiatan)	kegiatan	8	-	200,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	1,400,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			16:49	Kajian Tata Kelola Permodalan BumDes	Bundes yang dikaji	Bumdes	-	-	0	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000		800,000	Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
			17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Indeks partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%			794,840	75	900,000	75	4,700,000	75	3,700,000	75	700,000	75	10,794,840		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
			17:04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Profil Desa)	Jumlah Data Profil Desa dan Kelurahan yang dimonev	Desa/ Kel	372	372	100,000	372	200,000	372	200,000	372	200,000	372	200,000	372	900,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kab Bone
			17:06	Pendayagunaan Profil -desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendayagunakan Profil Desa dan Kelurahan	Des/K el	306			372	100,000	372	100,000	372	100,000	372	100,000	372	400,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kab Bone
		-	17:13	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa terpilih	Desa	318	10	393,790	0		177	4,000,000	141	3,000,000	0		328	7,393,790	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	17:14	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Jumlah PAW	Desa	1	8	301,050	5	200,000	5	200,000	5	200,000	5	200,000	20	1,101,050	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	17:15	Pengukuhan Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang dikukuhkan (Desa)	Desa	328	0		1622	200,000	0		0		0		328	200,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
			17	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah LPMD yang di bina dari seluruh LPM yang aktif (Lembaga)	Lembaga	0	0	0	328	200,000	328	200,000	328	200,000	328	200,000	328	800,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kab Bone
		-			Jumlah LPM terbaik dari jumlah LPMD yang aktif (Lembaga)	Lembaga	0	0	0	3		3		3		3		12	-		
		-	18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang bersertifikat	%		60	800,000	70	2,800,000	70	1,800,000	75	2,035,000	75	1,500,000	75	8,935,000		
		-	18:02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparat Terlatih dalam pengelolaan keuangan desa (orang)	Orang	656			328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	300,000	1312	1,200,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
		-	18:03	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat yang terlatih dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa (orang)	Orang	0			328	300,000							328	300,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:13	Pelatihan Awal Masa Jabatan	Jumlah Kepala Desa yang dilatih (orang)	Orang	318	18	60,000	0	-	177	200,000	141	185,000	0	-	328	445,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:15	Bimbingan Teknis Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti bimbingan Teknis (orang)	Orang	328			328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	300,000	1312	1,200,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:16	Bimbingan Teknis Perangkat Desa	Jumlah Perangkat yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang)	Orang	1148	328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	1,500,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:18	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (orang)	Orang	328			328	300,000	328	300,000					656	600,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:19	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam bidang politik hukum desa	Jumlah Aparat yang terlatih dalam bidang politik, hukum desa (orang)	Orang	0			328	300,000							328	300,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:20	Monitoring dan evaluasi kerjasama desa	Jumlah BKAD yang dibina di monitoring dan di evaluasi dari BKAD aktif (lembaga)	Lembaga	1	24	100,000	24	100,000	24	100,000	24	100,000	24	100,000	24	500,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:22	Pelatihan Kapasitas BPD	Jumlah Anggota BPD yang terlatih	Orang	328	328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	300,000	328	1,500,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:23	Pelatihan Administrasi Desa	Jumlah Tenaga Administrasi Desa yang terlatih	Orang	0	0		328	300,000			328	300,000			656	600,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
		-	18:23	Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPJMD Desa	Jumlah Tim Pemysusun RPJMD Desa yang ditingkatkan	Org	0	20	40,000	0	-	0	0	177	250,000	141	200,000	338	490,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kab Bone
		-	18:24	Pelatihan Manajemen Kekayaan dan Aset Desa	Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan manajemen kekayaan dan Aset Desa (Orang)	Orang	0			328	300,000							328	300,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab Bone
		-	19	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase PKK Aktif di Desa	%			1,947,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	9,947,000		
		-	19:02	Revitalisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah Dokumen Pokjanal Posyandu	Dok/SK		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19:05	Peningkatan Kapasitas Kelompok Industri Rumah Tangga PKK	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan (orang)	Orang		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19:09	Kegiatan Sarasehan Penguatan TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan & Kabupaten	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Kegiatan sarasehan Penguatan TP PKK	Kecamatan		100	200,000	27	200,000	27	200,000	27	200,000	27	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19:14	Pelatihan Kader Posyandu di Desa	Jumlah Kader Posyandu yang dilatih	orang		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribuan)		
								TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)		
		-	19:15	Pelatihan MC bagi kader PKK	Jumlah orang yang dilatih MC	orang		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19:16	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan untuk turut serta dalam pembangunan desa	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi dan pembinaan kelompok perempuan (orang)	orang		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	p	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19:18	Pelatihan Pengurus Kader Pokja Desa Sehat	Jumlah Pengurus Kader Pokja Desa Sehat yang dilatih	orang		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19:19	Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam membangun desa	Jumlah Peserta perempuan yang bimtek (orang)	orang	30	328	147,000	328	200,000	328	200,000	328	200,000	328	200,000	1640	947,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19....	Orientasi Kader Posyandu terintegrasi	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti orientasi	orang		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	19:11	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan pada Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang diikuti	kegiatan		100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	500	1,000,000	Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	22	Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Persentase Ketepatan Penyeteroran Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	%			249,840	75	695,000	75	670,000	75	410,000	75	430,000	75	2,205,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribuan)		
								TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)	TARGET	RP (Ribuan)				
		-	22:06	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan keuangan dan aset desa (Desa)	Desa	328	328	175,450	328	300,000	328	200,000	328	210,000	328	220,000	1312	930,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kab. Bone
		-	22:07	Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tk. Kecamatan	Jumlah Aparat yang terlatih dalam verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tk. Kecamatan	Orang	48			72	275,000	72	275,000					147	550.000.	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	22:08	Pembinaan Administrasi pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	328	328	74,390	328	120,000	328	195,000	328	200,000	328	210,000	1312	725.000.	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	23	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Persentase KPMD Aktif	%			80,000	85	80,000	85	80,000	85	80,000	97	90,000	87	410,000		
		-	23:03	Peningkatan Kapasitas KPMD	Jumlah Kader PMD yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	Org	120	40	80,000	40	80,000	40	80,000	40	80,000	48	90,000	208	410,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kabupaten Bone
		-	25	Peningkatan Perkembangan desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Status Desa	%		85	319,710	85	400,000	85	400,000	87	400,000	90	400,000	90	1,919,710		
		-	25:03	Evaluasi dan lomba desa dan kelurahan (diubah)	Jumlah Dokumen evaluasi lomba desa dan kelurahan	Dokumen		1	319,710		-		-		-				319,710	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kabupaten Bone
			25:03	Evaluasi Tingkat Perkembangan desa dan Kelurahan	Dokumen hasil evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen				1	400,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000		1,600,000	Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan	Dinas PMD Kabupaten Bone

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada kewenangan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pada tahun 2018-2023, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun seluruh pihak khususnya di lingkungan DPMD dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai hingga akhir periode tahun 2023.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone ini sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan untuk kurun waktu lima (5) tahun. Rencana Strategis ini dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi kinerja program.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 serta keberhasilan dalam mewujudkan Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan peningkatan keswadayaan dan kemandirian masyarakat di Kabupaten Bone memerlukan dukungan dan kemitraan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

Watampone, 28 Maret 2019.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE**



H. A. ARSYAD, SH, M.Si

